



Pengaruh Whistleblowing System, Sistem Pengendalian Internal, dan Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa

Guntur Samudra ^{1*}, dan Tutut Dewi Astuti ²

¹ Universitas Mercu Buana Yogyakarta; Bantul, Yogyakarta; e-mail : Samudrag82@gmail.com

² Universitas Mercu Buana Yogyakarta; Bantul, Yogyakarta; e-mail : tutut@mercubuana-yogya.ac.id

* Corresponding Author : Guntur Samudra

Abstract: This study aims to investigate the prevention of fraud in village fund management in Muntuk Village, Bantul Regency, Yogyakarta, by analyzing the effects of organizational culture, internal control, and whistleblowing methods. The inquiry was initiated due to the increasing number of allegations of corruption involving village funds. These examples suggest that there is a lack of monitoring and integrity among the village leadership. Questionnaires were sent out to influential people in the community to collect data for this quantitative associative research. To analyze the data, multiple linear regression analysis was employed. The results show that whistleblowing procedures and corporate culture are more effective in preventing fraud than the internal control system. These findings highlight the critical need for better organizational culture and effective reporting methods to achieve transparent and accountable village governance.

Keywords: Whistleblowing System; Internal Control System; Organizational Culture; Fraud Prevention; Village Fund.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa di Desa Muntuk, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, dengan menganalisis pengaruh budaya organisasi, pengendalian internal, dan metode whistleblowing. Penelitian ini dimulai karena meningkatnya jumlah dugaan korupsi yang melibatkan dana desa. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa terdapat kurangnya pengawasan dan integritas di antara para pemimpin desa. Kuesioner dikirimkan kepada orang-orang berpengaruh di masyarakat untuk mengumpulkan data untuk penelitian asosiatif kuantitatif ini. Untuk menganalisis data, analisis regresi linier berganda digunakan. Hasilnya menunjukkan bahwa prosedur whistleblowing dan budaya perusahaan lebih efektif dalam menghindari kecurangan daripada sistem pengendalian internal. Temuan ini menyoroti kebutuhan kritis akan budaya organisasi yang lebih baik dan metode pelaporan yang efektif untuk mencapai tata kelola desa yang transparan dan akuntabel.

Kata kunci: Whistleblowing System; Sistem Pengendalian Internal; Budaya Organisasi; Pencegahan Fraud; Dana Desa.

Received: 8 November 2025

Revised: 10 November 2025

Accepted: 18 November 2025

Published: 29 November 2025

Curr. Ver.: 29 November 2025



Copyright: © 2025 by the authors.

Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

1. Pendahuluan

Pemerintah menggunakan dana desa sebagai instrumen kunci untuk mendorong pertumbuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pengelolaan dana desa harus berlandaskan pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu akuntabilitas dan keterbukaan, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Pemerintah desa bertanggung jawab untuk memperlakukan masyarakat dan

pemerintah pusat dengan penuh rasa hormat dan akuntabilitas dalam penggunaan keuangan daerah. [1].

Namun dalam praktiknya, masih terdapat sejumlah permasalahan dalam pengelolaan anggaran desa, terutama yang berkaitan dengan penipuan dan penggelapan. Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan sebanyak 181 insiden yang melibatkan uang desa mengakibatkan kerugian Rp40,6 miliar antara tahun 2015 hingga awal tahun 2018.

Kasus korupsi di sektor pemerintahan desa bahkan menempati posisi tertinggi pada tahun 2021 dengan 62 kasus yang dilaporkan (ICW & KPK, 2021). Salah satu kasus di mana negara mengalami kerugian sebesar Rp230 juta adalah di Desa Muntuk, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, ketika kasus korupsi dana desa diusut [2]. Hal ini menyoroti perlunya langkah-langkah pencegahan yang efektif karena menunjukkan belum adanya struktur pengawasan yang kuat atau budaya integritas di tingkat desa.

Salah satu strategi penting untuk mencegah penipuan adalah membangun sistem pelaporan pelanggaran. Sistem ini menawarkan pilihan bagi pegawai untuk melaporkan pelanggaran dengan cara yang aman dan bijaksana. Whistleblowing system berfungsi untuk mendeteksi dan mencegah tindakan penipuan yang dapat merugikan organisasi [3], [4], [5]. Sistem ini mendorong partisipasi aktif masyarakat dan aparat desa untuk melaporkan adanya indikasi kecurangan sehingga dapat ditindaklanjuti lebih cepat [6].

Sistem pengendalian internal merupakan komponen krusial di samping sistem whistleblower. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mendefinisikan Sistem Pengendalian Intern (SPI) sebagai suatu proses berkelanjutan yang dijalankan oleh manajemen dan seluruh jajaran organisasi untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, dan perlindungan aset negara. SPI yang tangguh membantu menurunkan tingkat kecurangan karena semua aktivitas keuangan dapat dengan mudah dilacak dan dipertanggungjawabkan. [7].

Budaya organisasi merupakan elemen ketiga yang berkontribusi terhadap pencegahan kecurangan. Nilai-nilai, konvensi, dan keyakinan yang memengaruhi perilaku anggota organisasi merupakan bagian dari budayanya [8]. Organisasi dengan budaya yang baik cenderung tidak mengalami penyimpangan karena mendorong etos kerja, kejujuran, dan akuntabilitas. [9].

Hasil penelitian sebelumnya masih saling bertentangan. Akuntabilitas, budaya organisasi, mekanisme pengendalian internal, dan metode whistleblowing semuanya memiliki dampak besar pada pencegahan penipuan dalam administrasi dana desa, menurut penelitian [10]. Budaya organisasi dan sistem pengendalian internal, menurut penelitian [6], sangat meningkatkan pencegahan kecurangan, tetapi pendekatan whistleblowing tidak terbukti memberikan pengaruh yang sama. Studi kasus ini dirancang untuk mengkaji ulang dampak budaya organisasi, sistem pengendalian internal, dan prosedur whistleblowing terhadap efektivitas pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa di Yogyakarta. Studi ini dilakukan di Desa Muntuk, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul. Perbedaan antara fenomena ini dan studi-studi sebelumnya menjadi dasar kesimpulan ini. Diharapkan bahwa penelitian ini secara teoritis akan memajukan investigasi akuntansi sektor publik di masa depan. Pemerintah desa juga dapat memperoleh manfaat praktis dari penelitian ini dengan mengembangkan budaya perusahaan berbasis integritas dan kerangka kerja tata kelola yang kuat.

2. Kajian Pustaka atau Penelitian Terkait

2.1. Kerangka Teoritis

Ide Segitiga Penipuan tradisional yang diusulkan oleh Cressey (1953) dikaitkan dengan pencegahan penipuan di instansi pemerintah. Menurut hipotesis ini, tiga penyebab utama penipuan adalah peluang, pembenaran, dan tekanan. Menerapkan sistem pengendalian internal yang kuat dan membangun budaya perusahaan yang menghargai integritas dapat membantu mencegah penipuan dengan membatasi kemungkinan dan rasionalisasi yang dapat

digunakan pelaku [11]. Selain itu, teori Atribusi Sosial juga digunakan untuk memahami perilaku individu dalam pelaporan pelanggaran *whistleblowing*, di mana keputusan seseorang untuk melapor sangat dipengaruhi oleh persepsi terhadap risiko dan dukungan organisasi [6]. Karena budaya organisasi, sistem pengendalian internal, dan sistem pengungkapan pelanggaran merupakan karakteristik organisasi yang dapat mengubah dinamika perilaku aparaturnya terhadap pencegahan penipuan, maka kedua teori ini menjadi dasar penyelidikan dalam penelitian ini.

2.2 Whistleblowing System

Menurut [12], [13] sistem whistleblower adalah proses pelaporan pelanggaran yang memungkinkan seseorang mengungkapkan tanda-tanda penipuan tanpa khawatir akan ancaman atau pembalasan. Pendekatan ini menekan penyimpangan dalam organisasi publik dengan bertindak sebagai mekanisme kontrol sosial dan alat deteksi dini. Menurut penelitian sebelumnya oleh [10] penerapan mekanisme whistleblower meningkatkan pencegahan penipuan dalam pengelolaan dana desa.

Sementara itu, penelitian lain menghasilkan temuan yang berbeda. Sistem whistleblower tidak selalu berdampak besar pada pencegahan penipuan, menurut [6]. Hal ini terutama berlaku jika sistem pelaporan tidak didukung oleh langkah-langkah perlindungan whistleblower yang kuat dan budaya pelaporan yang terbuka. Hasil ini menunjukkan bahwa keberadaan sistem whistleblowing dan tingkat kepercayaan dan partisipasi aparat sangat mempengaruhi keberhasilannya.

Dengan demikian, penelitian ini menempatkan *whistleblowing system* sebagai variabel penting yang perlu diuji kembali, terutama dalam konteks pemerintahan desa yang memiliki struktur sosial dan budaya berbeda dengan organisasi publik lainnya.

2.3 Sistem Pengendalian Internal

Tujuan sistem pengendalian internal (ISC) adalah untuk memastikan efisiensi operasional organisasi, keakuratan laporan keuangan, dan kepatuhan bisnis terhadap semua peraturan yang berlaku [14]. Tujuan ISC adalah untuk mencegah penipuan dalam konteks Segitiga Penipuan. [15].

Menurut [10] dan [15] penguatan SPI dapat menurunkan risiko penipuan dalam pengelolaan dana publik. Namun, menurut penelitian lain oleh [16], SPI tidak selalu berhasil tanpa adanya kepemimpinan yang jujur dan pengawasan yang proaktif. Hal ini menyiratkan bahwa dedikasi manajerial dan pelaksanaan yang konsisten di tingkat desa sangat penting bagi keberhasilan SPI.

2.4 Budaya Organisasi

Nilai-nilai, adat istiadat, dan keyakinan bersama suatu organisasi membentuk budaya organisasinya, yang bertindak sebagai kerangka kerja untuk pengambilan keputusan dan perilaku [17]. Pembenaan pelaku penipuan dapat dikurangi dengan menumbuhkan budaya yang menghargai kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab sosial. [17].

Budaya perusahaan yang kuat membantu pejabat publik mengembangkan perilaku etis, menurut studi empiris [18]. Selain itu, [10] menemukan bahwa budaya organisasi secara signifikan meningkatkan pencegahan penipuan dalam administrasi dana desa. Di sisi lain, penelitian oleh [19] memverifikasi bahwa budaya organisasi yang buruk seringkali menyebabkan norma dan tanggung jawab etika bersifat formal dan tidak diterapkan dalam tindakan nyata, terutama dalam administrasi desa.

Mengingat nilai-nilai sosial dan kolektivitas masyarakat desa dapat mendukung atau melemahkan pengembangan budaya antikorupsi, studi ini berfokus pada evaluasi dampak budaya organisasi terhadap pencegahan penipuan dalam pemerintahan desa.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausal untuk mengevaluasi hubungan antara variabel independen (pencegahan kecurangan) dan variabel dependen (sistem pengendalian internal, budaya organisasi, dan mekanisme whistleblowing) [20], [21], [22]. Pendekatan kuantitatif digunakan dalam penelitian ini karena ingin mengeksplorasi korelasi antar variabel dengan memanfaatkan data numerik yang telah melalui analisis statistik. Peneliti berdomisili di Desa Muntuk, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Alasan pemilihan lokasi ini antara lain karena adanya kasus penyalahgunaan dana daerah yang terjadi baru-baru ini dan langkah-langkah yang sedang dilakukan untuk meningkatkan kerangka tata kelola keuangan daerah. Perwakilan pemerintah desa diberikan kuesioner untuk diisi selama satu minggu pada tahun 2025 guna mengumpulkan data. Partisipan dalam penelitian ini meliputi kepala desa, pejabat desa, Karang Taruna, bendahara desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMK), dan anggota Gerakan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Muntuk. Mengingat jumlah penduduk desa kurang dari 100 jiwa, maka sensus digunakan sebagai teknik pengambilan sampel.

Oleh karena itu, seluruh 30 perangkat desa dipilih untuk berpartisipasi dalam survei ini sebagai responden. Informasi yang digunakan dalam studi ini meliputi data sekunder dari peraturan pemerintah, literatur, dan temuan penelitian terdahulu yang relevan, di samping data primer yang dikumpulkan langsung dari responden menggunakan kuesioner. [23]. Tabel 1 di bawah ini memberikan informasi spesifik tentang distribusi partisipan penelitian.

Tabel. 1 Distribusi Responden Penelitian

Jabatan	Jumlah
Kepala Desa	1
Carik	1
Bendahara	2
Kasi	3
Kaur	3
LPMK	1
Posyandu	1
PKK	1
Baruskal	7
Karang Taruna	11
Total	30

Seluruh kuesioner yang disebarkan 30 eksemplar dapat diisi dan diolah kembali seluruhnya. Karakteristik responden memperlihatkan bahwa sebagian besar responden merupakan laki-laki. (80%), dengan tingkat pendidikan terakhir SMA/SMK (66,7%), dan rentang usia dominan antara 37–42 tahun (26,7%). Pendapatan responden sebagian besar berada pada kisaran Rp1.500.000 – Rp2.500.000 (83,3%).

3.1. Instrumen Penelitian

Indikator teoritis untuk setiap variabel menjadi dasar penyusunan instrumen penelitian. Tabel 2 di bawah ini menjelaskan instrumen-instrumen tersebut.

Tabel 2. Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Jenis	Indikator
Whistleblowing System (X ₁)	Variabel Independen	1. Ketersediaan saluran pelaporan pelanggaran.2. Perlindungan terhadap pelapor (<i>whistleblower</i>).3. Kerahasiaan identitas pelapor.4. Tindak lanjut terhadap laporan kecurangan.5. Komitmen pimpinan dalam menegakkan sistem pelaporan.
Sistem Pengendalian Internal (X ₂)	Variabel Independen	1. Lingkungan pengendalian yang efektif.2. Penilaian risiko dalam pelaksanaan kegiatan.3. Aktivitas pengendalian yang sesuai prosedur.4. Ketersediaan

		sistem informasi dan komunikasi yang transparan.5. Pemantauan dan evaluasi berkala terhadap kegiatan.
Budaya Organisasi (X ₃)	Variabel Independen	1. Nilai integritas dan kejujuran dalam bekerja.2. Disiplin dan tanggung jawab terhadap tugas.3. Kerjasama dan loyalitas antarpegawai.4. Keteladanan dan kepemimpinan yang etis.5. Keterbukaan dan komunikasi dalam organisasi.
Pencegahan Fraud (Y)	Variabel Dependen	1. Kepatuhan terhadap aturan dan prosedur.2. Transparansi dalam pengelolaan dana desa.3. Pengawasan internal dan audit berkala.4. Penerapan sanksi bagi pelaku kecurangan.5. Etika dan kesadaran anti-fraud aparat desa.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Statistik Deskriptif

Tabel 3 Deskriptive Statistics

Descriptive Statistics					
		Minimu	Maximu		Std.
	N	m	m	Mean	Deviation
x1	30	4,00	15,00	12,2667	3,23700
x2	30	6,00	25,00	17,4667	6,76570
x3	30	7,00	25,00	16,9333	6,59641
y	30	4,00	20,00	16,1000	4,45166
Valid (listwise)	N 30				

Tiga puluh partisipan dihitung sebagai observasi (N) dalam penelitian ini berdasarkan hasil pengolahan data. Statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel Sistem Whistleblowing dapat memiliki nilai antara 4 dan 15, dengan rata-rata 12,27 dan simpangan baku 3,237. Selain itu, rentang nilai untuk variabel Sistem Pengendalian Internal adalah 6–25, dengan simpangan baku 6,765 dan rata-rata 17,47. Dengan rentang nilai 7 hingga 25, simpangan baku variabel budaya organisasi adalah 6,569 dan rata-ratanya 16,93. Variabel pencegahan kecurangan memiliki nilai antara 4 dan 20, dengan rata-rata 16,10 dan simpangan baku 4,45. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden umumnya memiliki opini positif dan konsisten mengenai sistem pengendalian internal, budaya organisasi, inisiatif pencegahan kecurangan, dan implementasi sistem whistleblowing di Desa Muntuk, karena semua variabel memiliki nilai rata-rata yang relatif tinggi dibandingkan dengan nilai minimumnya.

4.2 Uji Regresi Linier Berganda

Untuk menganalisis hubungan antara variabel dependen dan independen, penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Di sini, kita dapat melihat hasil uji-t, yang belum lengkap.

Tabel 4 Coefficients

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	1.419	1.966		.722	.477
	x1	.483	.152	.352	3.174	.004
	x2	.232	.078	.353	2.966	.006
	x3	.277	.081	.411	3.419	.002

a. Dependent Variable: y

Untuk mengetahui bagaimana masing-masing variabel independen memengaruhi variabel dependen secara independen, uji-t digunakan berdasarkan hasil uji-t (parsial) yang telah dijelaskan sebelumnya dan tingkat signifikansi 0,05. Jika nilai p kurang dari 0,05, maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Berikut ini kesimpulan yang dapat ditarik dari tabel hasil uji-t parsial:

a. Dampak Sistem Whistleblowing terhadap Pencegahan Kecurangan (X1) (Y). Hasil pengujian untuk variabel Sistem Whistleblowing menunjukkan nilai signifikansi 0,004, yang lebih kecil dari 0,05, sehingga mendukung H2. Hasil menunjukkan bahwa kecurangan dalam pengelolaan dana desa berkurang secara signifikan dan positif oleh Sistem Whistleblowing.

b. Peran Sistem Pengendalian Internal dalam Mencegah Kecurangan (X2) (Y). Tingkat signifikansi 0,006 > 0,05 untuk variabel Sistem Pengendalian Internal dalam hasil pengujian menyebabkan penolakan H2. Artinya, Sistem Pengendalian Internal tidak berfungsi dengan baik dalam mencegah kecurangan dalam pengelolaan dana daerah.

(a) Bagaimana Budaya Perusahaan Mempengaruhi Upaya Pencegahan Kecurangan (X3) (Y). Nilai signifikansi 0,002 < 0,05 untuk variabel Budaya Organisasi dalam hasil pengujian mendukung penerimaan H3. Hal ini menunjukkan bahwa budaya organisasi mempunyai pengaruh yang baik dan substansial terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

5. Kesimpulan

Untuk menghindari kecurangan dalam pengelolaan dana desa di Desa Muntuk, Bantul, penelitian ini akan mengkaji pengaruh budaya organisasi, sistem pengendalian internal, dan sistem whistleblowing. Dalam hal pencegahan kecurangan, temuan menunjukkan bahwa budaya organisasi dan sistem whistleblowing jauh lebih efektif daripada sistem pengendalian internal. Hasil seperti ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan formal tidak seefisien pembinaan perilaku dan budaya etis di dalam perusahaan dalam hal pencegahan kecurangan. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat penerapan teori *Fraud Triangle* dengan menegaskan pentingnya faktor moral dan budaya organisasi dalam menekan peluang kecurangan. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah desa untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan integritas aparatur, serta mengoptimalkan sistem pelaporan pelanggaran yang transparan dan terpercaya. Keterbatasan penelitian ini terdapat pada jumlah responden yang relatif sedikit serta cakupan penelitian yang hanya berfokus pada satu desa.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar memperluas wilayah penelitian dan menambahkan variabel lain seperti komitmen organisasi atau kepemimpinan etis guna memperoleh hasil yang lebih komprehensif.

Kontribusi Penulis : Seluruh proses penelitian dan penulisan artikel ini, mulai dari penyusunan pendahuluan hingga penarikan kesimpulan, dilaksanakan secara mandiri oleh Guntur Samudra. Meskipun demikian, penyelesaian artikel ini tidak terlepas dari arahan, bimbingan, serta masukan konstruktif yang diberikan oleh Ibu Tutut Dewi Astuti selaku dosen pembimbing, khususnya terkait penyusunan sistematika dan kualitas penulisan ilmiah.

Pendanaan : Penelitian ini tidak menerima pendanaan eksternal

Ucapan Terima Kasih : Atas saran, wawasan, dan dorongan berharga yang memungkinkan penelitian ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Tutut Dewi Astuti, SE., M.Si, Ak, CA, CTA, ACPA, MCE, CTT, CAP. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Desa Muntuk, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, yang telah mengizinkannya mengumpulkan data dan membantu dalam proses tersebut.

Konflik Kepentingan : Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan dalam penelitian ini. Pihak pemberi dana tidak memiliki keterlibatan dalam perancangan penelitian, proses pengumpulan, analisis, maupun interpretasi data, serta tidak berperan dalam penyusunan naskah atau keputusan publikasi hasil penelitian. Penulis juga telah memastikan bahwa seluruh proses penelitian dilakukan secara objektif dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, sehingga integritas hasil penelitian ini tetap terjaga.

Daftar Pustaka

- [1] Muksin, A., Runtu, T., & Datu, C. V. (2023). Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Arumamang Kecamatan Kasiruta Barat Kabupaten Halmahera Selatan. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 6(2), 1281-1296..
- [2] R, S. Y. R. S. (2024, May 21). Kejari Bantul ungkap modus korupsi keuangan Kalurahan Muntuk, 2 tersangka bikin proyek fiktif. *Harianjogja.com*. <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2024/05/21/511/1175223/kejari-bantul-ungkap-modus-korupsi-keuangan-kalurahan-muntuk-2-tersangka-bikin-proyek-fiktif>
- [3] Simbolon, S., Ramadana, R., Elviani, S., & Trisna, E. (2020). *Fraud dan Pencegahannya*. Medan: CV. Pena Persada Redaksi.
- [4] Tama, I. F., Wijaya, A. L., & Nurhayati, P. (2022, October). Pengaruh Whistleblowing System, Peran Pengendalian Internal, Dan Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Fraud Pada Rumah Sakit Rujukan Pasien Covid-19 Kota Madiun. In *SIMBA: Seminar Inovasi Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi* (Vol. 4).
- [5] Akhyaar, K., Purwantini, A. H., Afif, N., & Prasetya, W. A. (2022). Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 13(2), 202-217.
- [6] Anlilua, P. (2023). Pengaruh Whistleblowing System, Sistem Pengendalian Internal, Dan Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Fraud. *Jurnal KIAFE*, 1(3), 34-48.
- [7] Alam, S. K. P. (2022). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud Dana Desa di Pemerintah Desa Dengan Budaya Etis Organisasi Sebagai Pemoderasi (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa di Kabupaten Magelang) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Magelang).
- [8] Yuliani, I. (2024). Analisis Pengaruh Budaya Organisasi, Kepemimpinan Islami, Kompensasi dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan PT. Migas Mandiri Pratama (MMP) Kalimantan Timur. *Al-Tijary*, 9(2), 149-163.
- [9] Kuncara, W. A. (2022). The influence of Whistleblowing System and internal control on fraud prevention at PT Pos Indonesia (Persero) Bandung City. *International Journal of Financial, Accounting, and Management*, 4(2), 101-113.
- [10] Rahmawati, E. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Budaya Organisasi, Sistem Pengendalian Internal, dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa. *Justice and Business*, 1(1), 1-8.
- [11] Wahyuningtiyas, T. N., & Pramudyastuti, O. L. (2022). Optimalisasi Whistleblowing System Melalui Peran Whistleblower Dalam Pendeteksian Tindakan Fraud: Sebuah Literature Review. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(2), 359-366.
- [12] Anggraeni, N. M., Sailawati, S., & Malini, N. E. L. (2021). Pengaruh Whistleblowing System, Sistem Pengendalian Internal, Budaya Organisasi, dan Keadilan Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 14(1), 85-92.
- [13] Lesmana, T. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Saksi Pelapor (Whistleblower) Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(1), 45-53.
- [14] Farochi, M. F. F., & Nugroho, A. H. D. (2022). Pengaruh Pengendalian Internal dan Good Corporate Governance terhadap Pencegahan Fraud. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora*, 6(1), 86-92.

- [15] A. Amelia dan E. Karista, "Peran Pengendalian Internal Terhadap Fraud Triangle," *Jurnal Akuntansi, Audit, dan Aset (AAA)*, vol. 4, no. 1, 2022.
- [16] V. V. Adhivinna, M. Selawati, dan M. S. Umam, "Kompetensi Aparatur dan Sistem Pengendalian Internal pada Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa," *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, vol. 6, no. 2, pp. 63-74, 2022.
- [17] A. Hanifah, C. Kuntadi, dan R. Pramukty, "Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Peran Audit Internal, Komitmen Manajemen Terhadap Good Corporate Governance," *Economina: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, vol. 12, no. 2, pp. 45–56, 2023.
- [18] Dewi, L. P., Sunaryo, K., & Yulianti, R. (2022). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Moralitas Individu, Budaya Organisasi, Praktik Akuntabilitas, dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa di Kecamatan Prambanan, Klaten). *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 9(2), 323-340.
- [19] Rustyaningsih, S. (2023). Budaya Organisasi dan Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa dengan Moralitas Individu sebagai Mediasi. *Jkbn (Jurnal Konsep Bisnis Dan Manajemen)*, 9(2), 149-160.
- [20] P. Lisdiono, M. Salim, dan S. Suwarno, "Pengaruh Good Corporate Governance dan Budaya Organisasi terhadap Pencegahan Fraud pada PT Bank Central Asia Tbk," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, vol. 11, no. 1, pp. 157–164, 2023.
- [21] U. Nahari dan K. Kusuma, "Pengaruh Internal Control, Good Public Governance, Budaya Organisasi, Tekanan Target, Kompensasi dan Arogansi terhadap Pencegahan Fraud," *Jurnal Sosial dan Teknologi*, vol. 3, no. 3, pp. 195–209, 2023.
- [22] Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- [23] Nuryadi, S., Astuti, T. D., Utami, E. S., & Budiantara, M. (2017). *Dasar-dasar statistik penelitian*. Yogyakarta : Sibuku Media.
- [24] Dhewy, R. C. (2022). Pelatihan Analisis Data Kuantitatif Untuk Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(3), 4575-4578.